

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran serta perincian berbagai kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk waktu satu tahun (Rachmat, 2010). Anggaran tersebut merupakan batas tertinggi dari pengeluaran negara untuk melaksanakan tugas dan keperluan negara dan penerimaan negara yang di perkirakan dapat menutup pengeluaran dalam periode tertentu, agar tidak menimbulkan defisit anggaran.

(Sumarsono, 2010) berpendapat bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi biaya dari kinerja pemerintah yang hendak dicapai dalam periode tertentu dimana anggaran tersebut harus di konfirmasi kepada publik untuk di beri masukan dan kritik.

1. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU Nomor 33, 2004).

Definisi Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut (Permendikbud Nomor 55, 2005), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah

sesuai dengan prioritas nasional . Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sarana prioritas nasional.

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Menurut (Permendikbud Nomor 7, 2019) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Bab 1 Pasal 1, dana Alokasi Khusus Non Fisik yang selanjutnya disebut DAK Non fisik adalah dana yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Tahun 2019 terdapat 4 tambahan jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik . Tambahan jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tersebut adalah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisata serta Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS).

3. Pengertian dan Tujuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini.

Tujuan pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ialah untuk meningkatkan layanan sekolah yang berkualitas.

4. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut (Pekei, 2016) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut (Mardiasmo, 2021) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*Outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program, semakin besar kontribusi keluaran (*output*) yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau

sasaran yang di tentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

b. Indikator Efektivitas Pengelolaan Dana

Efektivitas merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan dana di sekolah. Oleh karena itu, pengelolaan dana harus berpijak pada indikator efektivitas yang dapat diukur dari berbagai perspektif. Menurut (Mulyadi, 2013) efektivitas pengelolaan dana dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

1) Tepat sasaran

Pengelolaan dana harus sesuai sasaran dan memenuhi target yang telah ditetapkan untuk objek dan subjek dari penggunaan dana tersebut.

2) Tepat jumlah

Pengelolaan dana haruslah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan yang telah dihitung dan ditetapkan sebelumnya

3) Tepat waktu

Dalam hal waktu haruslah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

5. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Menurut (Halim, 2002) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk

meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang di percayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas dalam manajemen keuangan sekolah berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggungjawab. Ada tiga pilar utama menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

- a) Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan sebagai komponen dalam mengelola sekolah.
- b) Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat di ukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- c) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

Akuntabilitas didalam menejemen keuangan sekolah berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggungjawab. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu :

- a) Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan sebagai komponen dalam mengelola sekolah.
- b) Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- c) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat .

6. Indikator Akuntabilitas

Menurut (Baedhowi & Dharma, 2010) ada beberapa indikator akuntabilitas yakni sebagai berikut :

- a. Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah menyampaikan kepada stakeholders (pemangku kepentingan) di awal setiap tahun anggaran
- b. Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan di sampaikan kepada publik stakeholders (pemangku kepentingan)
- c. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik atau stakeholders (pemangku kepentingan)
- d. Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan
- e. Memberikan tanggapan terhadap pernyataan atau pengaduan publik

7. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

(Wibowo, 2010) menyebutkan bahwa transparansi merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keadaan keuangan, pengelolaan, dan kepemilikan.

Menurut (Baedhowi & Dharma, 2010) transparansi sekolah adalah keadaan dimana setiap orang terkait dengan kepentingan pendidikan, dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Dalam konsep pendidikan, transparansi memiliki makna kepolosan, apa adanya, tidak curang, jujur dan terbuka. Transparansi menjamin bahwa data sekolah yang di buat dan di laporkan haruslah terjamin kebenarannya. Apabila ada perubahan data sekolah, harus segera mengungkapkan kepada semua pihak yang terkait.

b. Tujuan Transparansi

Menurut (Baedhowi & Dharma, 2010) transparansi di tujukan untuk membangun adanya kepercayaan dan keyakinan publik terhadap pihak sekolah adalah lembaga pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa. Bersih dalam arti jauh dari kata KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), berwibawa dalam arti profesional. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan secara penuh antara pihak sekolah dan publik dengan cara tersedianya informasi yang memadai dan mudah untuk mendapatkan informasi yang akurat .

c. Indikator Transparansi

Menurut (Baedhowi & Dharma, 2010) transparansi dalam lembaga pendidikan harus di tingkatkan agar publik memahami situasi dan kondisi sekolah, maka dengan demikian memberi kemudahan bagi publik untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1.	Tri Novita Sari Sinaga (2021)	Analisis Prinsip Akuntanbilita & Transparansi atas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Widya Dharma Bandar Lampung	Metode yang di gunakan di penelitian ini adalah metode Kualitatif	Penerapan prinsip akuntanbilitas atas penggunaan dana BOS di SMP Widya Dharma Bandar Lampung belum sesuai peraturan pemerintahdi karenakan sekolah belum melaksanakan laporanpertanggungja waban kepada masyarakat. Penerapan prinsip transparansi atas penggunaan dana BOS di SMP Widya Dharma Bandar Lampung belum sesuai peraturan pemerintah dikarenakan sekolah belum mengelola secara terbuka terkait informasi laporan pertanggungjawaban dan penyajian informasi kepada masyarakat.

2.	Astuti (2017)	Analisis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Ibtidaiyah Jamiatul Khaer Mallengkeri Makasar	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif	<p>Sistem & Prosedur penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan telah memenuhi prosedur yang baik. Penanggungjawab dari seluruh kegiatan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Kepala Sekolah yang dimana penggunaan tersebut</p> <p>dilaksanakan oleh bendahara sekolah yang wajib dilampirkan sesuai dengan prinsip akuntansi .</p> <p>Pengendalian secara keseluruhan & pelaksanaan kegiatan operasional telah sesuai dengan peraturan & prosedur yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan ,di mana pelaksanaan kegiatan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah mencapai target dan efektif, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan.</p>
----	---------------	--	---	--

3.	Jumiantanti (2018)	Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sma Muhammadiyah Di Kabupaten Sidenreng Rappang	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya keterlibatan semua oknum yang berkepentingan mulai dari Dinas pendidikan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan dan komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan standar operasional prosedur pada masing-masing sekolah tersebut.
----	--------------------	---	--	---

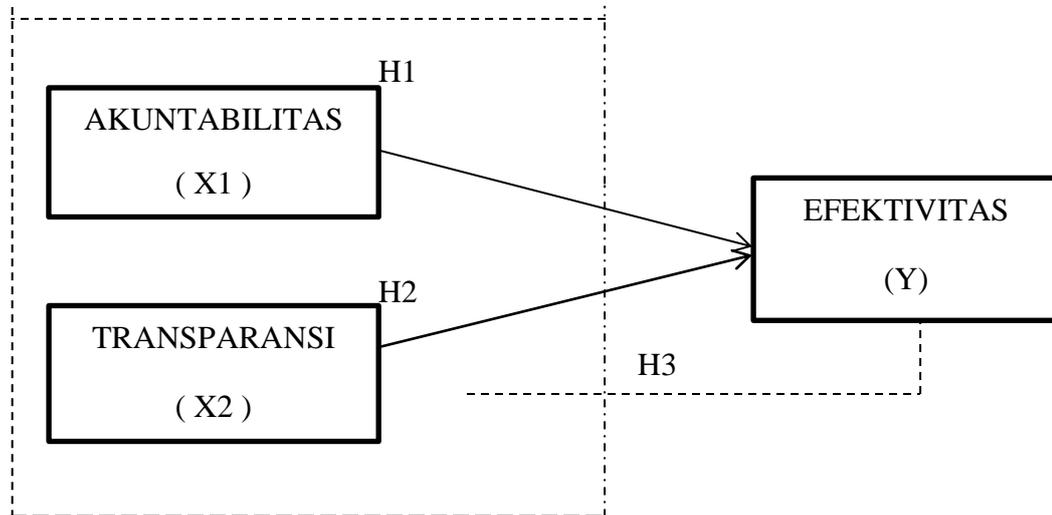
Tabel 2.1

Sumber: Data di olah tahun 2023

C. Kerangka Teori

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada landasan teori diatas telah disusun suatu kerangka teori sebagai berikut :

Bagan Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)



Gambar 2.1

Sumber : diolah penulis, 2023

D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas , maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- H1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)
- H2 : Transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)
- H3 : Akuntabilitas & Transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)